



TIONGKOK – SRI LANKA: ANALISIS DAMPAK KEHADIRAN TIONGKOK DI SRI LANKA

Ellya Yunita Aslam, Reni Windiani, Fendy Eko Wahyudi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www/fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The civil war that occurred between ethnic Sinhala and ethnic Tamil in Sri Lanka provided an opportunity for China to be present by using foreign aid instrument. The expansion of foreign aid from China through foreign loans aims to support Sri Lanka in building its infrastructure development. The Chinese foreign loans every year gives Sri Lanka a tendency to experience a condition of dependence. Therefore, this study focuses on analyzing Sri Lanka's dependence on China and how the impact as a result of this dependence relations. This study analyzes using dependency theory combined with the concept of foreign aid and uses qualitative methods. The results of this study indicate that there is a condition of Sri Lanka's dependence on China with China's success in expanding its economic influence in Sri Lanka.

Keywords: China, Sri Lanka, Dependency, Foreign Loan.

PENDAHULUAN

Sri Lanka resmi merdeka pada 4 Februari 1948 serta memiliki etnis asli yakni etnis Sinhala sebagai etnis dominan yang memeluk agama Budha. Di sisi lain, terdapat etnis Tamil yang masuk ke Sri Lanka sebagai konsekuensi dari perluasan pedagang asal India dan menjadi etnis minoritas. Di bawah Perdana Menteri S.W.R.D. Bandaranaike pada awal kemerdekaan Sri Lanka, ia mencetuskan dua kebijakan yang diskriminatif terhadap etnis Tamil, yakni kebijakan “*Ceylon Citizenship Act*” dan “*Sinhala Only Act*”. Dua kebijakan diskriminatif tersebut lantas menyebabkan banyak etnis Tamil jatuh miskin dan menjadi pengangguran. Bahkan sebanyak 300.000 etnis Tamil dibuat tidak memiliki kewarganegaraan di Sri Lanka. Hal tersebut lantas memunculkan kemarahan etnis Tamil sehingga memunculkan kelompok separatisme bernama *Liberation Tigers of Tamil Eelam*.

Perang sipil yang terjadi antara etnis Sinhala dan etnis Tamil berakhir pada tahun 2009 dengan bantuan luar negeri dari Tiongkok berupa bantuan militer, bantuan finansial, dan bantuan diplomasi. Pasca berakhirnya perang sipil, hubungan kedua negara terus berlanjut dengan kehadiran Tiongkok dalam memberikan bantuan luar negerinya berupa pinjaman luar negeri setiap tahunnya. Pinjaman luar negeri Tiongkok lantas digunakan oleh pemerintah Sri Lanka untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, rel kereta, dan bandara (Department of External Resources, 2022). Terjadi peningkatan pinjaman luar negeri Sri Lanka terhadap Tiongkok setiap tahunnya di mana hal ini berdampak pada peningkatan pembayaran hutang luar negeri dan bunga hutang luar negeri yang sangat membebani Sri Lanka.

Ketergantungan Sri Lanka terhadap Tiongkok sebagai konsekuensi dari adanya bantuan luar negeri berupa pinjaman luar negeri menarik untuk diteliti. Penelitian ini berusaha memberikan perkembangan dari sejumlah penelitian terdahulu seperti penelitian dari Adhe Nuansa Wibisono yang berjudul “*China’s “Belt and Road Initiative” in Sri Lanka : Debt Diplomacy in Hambantota Port Investment*” (Wibisono, 2019) yang membahas mengenai dampak kebijakan BRI (*Belt and Road Initiative*) Tiongkok dengan menggunakan *Debt Diplomacy*. Penelitian selanjutnya yang menjadi acuan yakni penelitian dari Madanayaka, S.A.K yang berjudul “*Opportunities for Sri Lanka through China-Sri Lanka Relations (2004-2015)*” (Madanayaka, 2016). Penelitian tersebut membahas mengenai kedekatan hubungan antara Tiongkok dan Sri Lanka sejak 1952 dari sisi keuntungan yang didapatkan oleh kedua negara. Penelitian terakhir yang menjadi acuan penulis ialah penelitian dari Saman Kelegama yang berjudul “*China-Sri Lanka Economic Relations: An Overview*” (Kelegama, 2014) yang berfokus untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi antara Tiongkok dan Sri Lanka. Dalam penelitian ini penulis membawa pembaharuan terhadap literatur dengan mendeskripsikan dampak dari ketergantungan dan pengaruh bantuan Tiongkok terhadap kondisi perekonomian di Sri Lanka.

METODOLOGI DAN KERANGKA TEORITIK

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kehadiran Tiongkok di Sri Lanka serta melihat dampak ketergantungannya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti berita, transkrip dari *YouTube*, buku, laporan, makalah, situs resmi, dokumen pendukung, artikel, dan jurnal penelitian yang sekiranya berkaitan dan mendukung pembahasan dan kebutuhan penelitian.

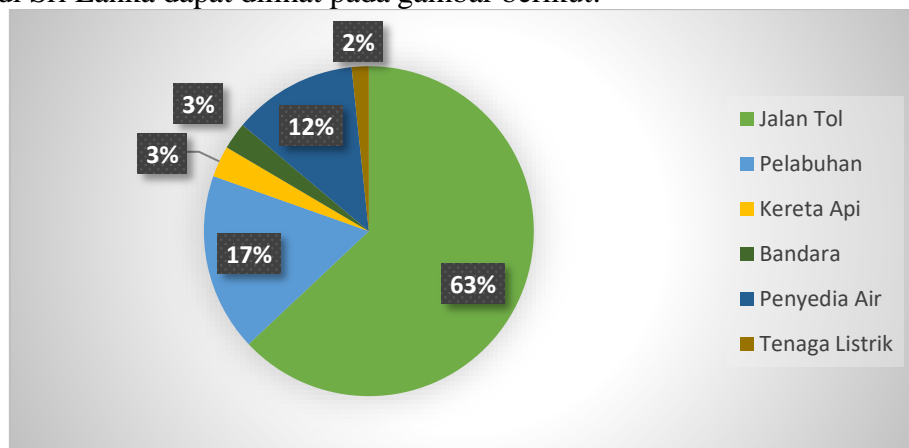
Untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh bantuan Tiongkok terhadap perekonomian di Sri Lanka diperlukan kerangka pemikiran konseptual. Penelitian ini menggunakan teori ketergantungan dari pandangan Theotonio Dos Santos dalam melihat kondisi ketergantungan dan keterbelakangan yang terjadi antara negara pusat dan negara pinggiran. Pandangan Theotonio Dos Santos mengenai ketergantungan ialah sebagai situasi di mana ekonomi negara pinggiran mengalami ekspansi oleh perluasan dan perkembangan ekonomi negara pusat sehingga cenderung menguntungkan negara pusat dan merugikan negara pinggiran. Dos Santos beranggapan bahwa hubungan negara dapat dikatakan ketergantungan apabila ekonomi negara pusat atau dominan dapat berekspansi dan berdiri sendiri sedangkan negara pinggiran hanya dapat merasakan dampak dari perubahan sebagai konsekuensi dari adanya ekspansi tersebut baik secara positif maupun negatif. Ia membagi hubungan ketergantungan yang terjadi antara negara maju dengan negara berkembang ke dalam tiga bentuk; (a) ketergantungan kolonial; (b) ketergantungan finansial-industrial; dan (c) ketergantungan industrial-teknologi (dos Santos, 1970).

Theotonio Dos Santos memandang ketergantungan sebagai situasi di mana ekonomi negara pinggiran mengalami ekspansi oleh perluasan dan perkembangan ekonomi negara pusat sehingga cenderung menguntungkan negara pusat dan merugikan negara pinggiran (Dos Santos, 1970). Karena akar pemikiran teori ketergantungan adalah dari Marxisme, maka teori ketergantungan berasumsi bahwa hubungan asimetris antara negara pusat dan negara pinggiran hanya menguntungkan satu pihak saja, yakni negara pusat. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa sumber daya bergerak dan mengalir dari negara pinggiran ke negara pusat. Aliran sumber daya tersebutlah yang memperkaya negara inti sementara di sisi lain memiskinkan negara pinggiran. Selain itu, negara pusat lebih condong untuk menyuplai barang jadi dan teknologi sedangkan negara pinggiran hanya berperan sebagai penyuplai bahan mentah (Rosyidin, 2020).

Adapun penelitian ini menggunakan konsep bantuan luar negeri yang digunakan untuk melihat ketergantungan bantuan luar negeri dari Tiongkok terhadap Sri Lanka. Menurut K. J. Holsti bantuan luar negeri didefinisikan sebagai sebuah transfer teknologi, uang, dan nasehat-nasehat teknis dari negara donor untuk negara penerima. Mengacu pada pengertian tersebut, ketergantungan bantuan luar negeri ditandai dengan adanya transfer bantuan dari negara pusat ke negara pinggiran. Dalam melihat bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor, Picard mengelompokkan jenis bantuan luar negeri ke dalam empat pengelompokkan berdasarkan tujuan utama dari pemberian bantuan tersebut yakni; (a) *humanitarian relief*; (b) *development*; (c) *diplomacy*; dan (d) *commerce* (Picard et al., 2008). Lebih lanjut, Sogge mengelompokkan bantuan luar negeri dapat dilihat dari motifnya, yakni; (a) motif kemanusiaan; (b) motif ekonomi; dan (c) motif sosial politik (Andersson, 2009).

PEMBAHASAN

Tiongkok memberikan dua jenis bantuan luar negerinya terhadap Sri Lanka berupa pinjaman luar negeri dan bantuan hibah. Pinjaman luar negeri Tiongkok diberikan melalui *China – EXIM Bank*, *China – Industrial & Commercial Bank*, *China Development Bank* (CDB), dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Adapun alokasi pinjaman luar negeri Tiongkok di Sri Lanka dapat dilihat pada gambar berikut:



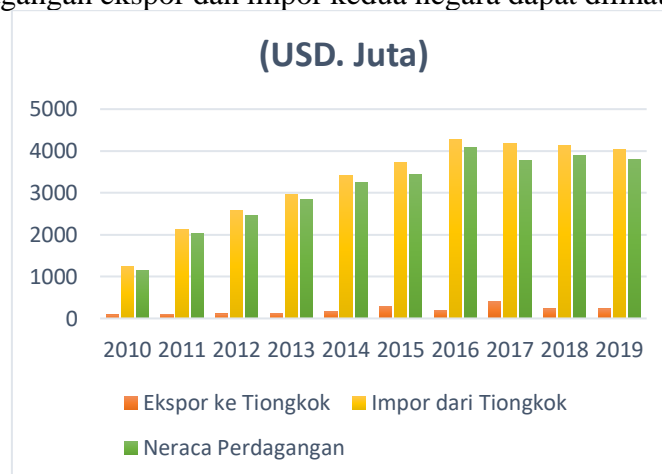
Gambar 1. Alokasi Pinjaman Luar Negeri dari Tiongkok

Mengacu pada pengelompokkan jenis bantuan luar negeri menurut Picard pemberian pinjaman luar negeri dari Tiongkok berlandaskan pada tujuan *commerce* (Picard et al., 2008). Di mana bantuan luar negeri merupakan penyediaan insentif finansial untuk keperluan impor barang dan jasa dari negara donor ke negara penerima. Lazimnya, bantuan ini diberikan dalam bentuk proyek yang spesifik. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa alokasi pinjaman luar negeri paling banyak digunakan untuk pembangunan proyek yang spesifik seperti jalan tol, pelabuhan, kereta api, bandara, kebutuhan pasokan air, dan tenaga listrik. Lebih lanjut, bantuan luar negeri tersebut juga berlandaskan pada tujuan *development* (Picard et al., 2008). Di mana bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor diartikan sebagai dukungan bagi negara penerima guna meningkatkan ekonomi dan sosial. Pinjaman luar negeri yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur memiliki tujuan utama untuk menstabilkan dan meningkatkan perekonomian Sri Lanka.

Keberhasilan Sri Lanka dalam menuntaskan konflik internal yang disebabkan oleh kelompok separatisme LTTE tidak lain juga karena mendapatkan bantuan dari Tiongkok. Bantuan luar negeri saat terjadi perang sipil di Sri Lanka didasari oleh tujuan *humanitarian relief* (Picard et al., 2008). Di mana bantuan luar negeri tersebut diberikan kepada suatu negara yang mengalami bencana yang banyak menelan korban jiwa. Baik yang diakibatkan oleh faktor

alam maupun faktor manusia. Menurut Sogge, terdapat motif kemanusiaan dalam bantuan tersebut karena mengekspresikan rasa belas kasih terhadap korban konflik dan memberikan bantuan kepada negara penerima dengan landasan utama untuk membantu masyarakat miskin di negara berkembang (Andersson, 2009). Lebih lanjut, menurut Picard bantuan luar negeri Tiongkok juga didasarkan pada tujuan *diplomacy* (Picard et al., 2008). Di mana bantuan luar negeri tersebut melibatkan pada aspek politik internasional, kepentingan keamanan, dan pengelolaan hubungan jangka panjang di antara pemerintah negara. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan negara-negara Barat meminta Sri Lanka agar menghormati HAM dan mencegah munculnya korban sipil akibat upaya penyelesaian konflik internal. Namun, pemerintah Sri Lanka menganggap hal-hal tersebut sebagai upaya untuk menghalangi mereka dalam menundukkan kelompok terorisme LTTE. Justru dengan adanya bantuan militer dan bantuan finansial dari Tiongkok membuat Sri Lanka tidak khawatir meski telah dikecam oleh PBB dan negara-negara Barat. Tiongkok juga membantu Sri Lanka dengan mendukung Sri Lanka di depan Dewan Keamanan PBB dengan mencegah pengenalan resolusi yang kritis terhadap pemerintah Sri Lanka (Marshall, 2009).

Dalam kasus Sri Lanka, Tiongkok berperan sebagai negara pusat yang menyuplai barang jadi, barang setengah jadi, teknologi dan manufaktur sedangkan Sri Lanka berperan sebagai penyuplai bahan mentah. Produk ekspor dari Sri Lanka ke Tiongkok adalah berupa hasil pertanian sedangkan produk yang di impor dari Tiongkok ke Sri Lanka berupa barang jadi. Kegiatan perdagangan ekspor dan impor kedua negara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Kegiatan Ekspor dan Impor dari Sri Lanka ke Tiongkok

Mengacu pada pokok pikiran Andre Gunder Frank sebagai salah satu pemikir teori ketergantungan, ia berpendapat bahwa hubungan negara pusat dan negara pinggiran dapat memperkaya negara pusat dengan menghasilkan surplus sebesar-besarnya oleh negara pusat (Frank, 1996). Pada gambar di atas dapat dilihat neraca perdagangan antara Tiongkok dan Sri Lanka cenderung mengalami defisit perdagangan sebagai akibat dari lebih tingginya nilai impor dari Tiongkok daripada nilai ekspor ke Tiongkok. Hal tersebut mendukung pandangan Frank di mana Tiongkok merasakan surplus perdagangan sementara Sri Lanka merasakan defisit perdagangan sebagai konsekuensi dari hubungan perdagangan tersebut. Pandangan Frank sejalan dengan pandangan Dos Santos, di mana hubungan perdagangan didasarkan pada kontrol pasar monopoli¹ yang akan meningkatkan surplus domestik negara pusat dan memperkuat kontrol mereka atas ekonomi negara pinggiran (Dos Santos, 1970). Dominasi

¹ Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya terdapat satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya (CNN Indonesia, 2022).

Tiongkok terhadap kegiatan impor mempengaruhi kondisi perekonomian domestik Sri Lanka. Sebab, penguasaan pasar tersebut menghambat perekonomian Sri Lanka yang diakibatkan oleh defisit perdagangan². Adanya defisit perdagangan memberatkan perekonomian Sri Lanka terlebih Sri Lanka tidak memiliki mitra alternatif untuk memenuhi komoditas-komoditas yang dibutuhkan dari Tiongkok. Komoditas tersebut diantaranya adalah teknologi manufaktur dan barang-barang elektronik. Sedangkan sumber utama ekspor Sri Lanka adalah dari produk-produk pertanian. Hal tersebut sejalan dengan pandangan teori ketergantungan di mana negara pusat menciptakan ketergantungan kepada negara pinggirannya untuk selalu impor teknologi (Dos Santos, 1970). Sedangkan negara pinggirannya menyuplai bahan mentah berupa sumber daya alam terhadap negara pusat.

Dalam pandangan Theotonio Dos Santos, di mana ketika negara pinggirannya sedang berada pada kondisi tergantung, maka pasar internalnya akan dibatasi oleh beberapa faktor (Dos Santos, 1970). Salah satunya ialah sebagian besar pendapatan nasional yang berasal dari ekspor akan digunakan kembali untuk membeli input yang dibutuhkan oleh negara pinggirannya. Dalam kasus Sri Lanka, tingginya permintaan domestik terhadap produk impor dari Tiongkok menyebabkan Sri Lanka bergantung dan selalu membeli produk dari Tiongkok karena tidak memiliki mitra alternatif lain selain Tiongkok (CSIS Brief, 2018).

Pembangunan infrastruktur di Sri Lanka banyak dialiri dana pinjaman luar negeri dari Tiongkok. Terlebih, kini Tiongkok telah menjadi negara donor terbesar yang memberikan dana pinjaman luar negeri bagi Sri Lanka. Secara tidak langsung, pinjaman dari Tiongkok terhadap Sri Lanka inilah yang kemudian memberikan dampak berupa ketergantungan terhadap Tiongkok. Sebagian besar alokasi dana signifikan tersebut terjadi dalam kurun waktu satu dekade terakhir antara Sri Lanka dan Tiongkok yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi Sri Lanka. Pembangunan mega proyek tersebut menunjukkan adanya preferensi khusus Sri Lanka untuk menerima tawaran bantuan luar negeri dari Tiongkok. Di mana berbagai proyek tersebut membebani ekonomi Sri Lanka. Khususnya terkait dengan pengembalian investasi terlebih beberapa aliran dana tersebut merupakan hutang luar negeri.

Meski telah merasakan dampak dari kehadiran bantuan luar negeri Tiongkok dengan pemberian pinjaman luar negeri yang menyebabkan beban pembayaran hutang luar negeri, tetapi Sri Lanka hingga tahun 2019 tetap menerima pinjaman luar negeri yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Mitra Sri Lanka	Pencairan Dana (USD. Juta)*		
	Pinjaman Luar Negeri	Hibah	Total
Bilateral	1.075,5	20,7	1.096,2
Tiongkok	648.4	-	648.4
Jepang	178.1	9.4	187.5
Perancis	73.0	0.2	73.2
Belanda	70.3	-	70.3
Inggris	45.2	-	45.2
India	39.1	-	39.1
Austria	21.4	-	21.4
Amerika Serikat	-	11.1	11.1
Multilateral	457.9	0.03	457.93
Bank Pembangunan Asia (ADB)	279.5	0.01	278.5
Bank Dunia (WB)	177.7	0.02	177.7

² Defisit Perdagangan terjadi apabila nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor (Bareksa, 2022).

<i>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)</i>	0.7	-	0.7
Total	1.533,4	20.73	1.554,13

Tabel 1. Pinjaman Luar Negeri Sri Lanka Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2019 Tiongkok menjadi penyumbang pinjaman luar negeri terbanyak dan kemudian disusul oleh Jepang, Perancis, dan Belanda. Alih-alih merasa jera akibat beban pembayaran hutang luar negeri dan bunga hutang luar negeri yang sangat tinggi dari Bank EXIM Tiongkok, Sri Lanka justru masuk ke babak baru dalam pinjaman luar negeri terhadap Tiongkok yakni dari *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Di mana AIIB merupakan salah satu lembaga keuangan milik Tiongkok untuk mendukung Kebijakan *Belt and Road Initiative*-nya.

Sri Lanka selama ini sedang mengalami ketergantungan yang luar biasa, hal tersebut dapat dilihat melalui jumlah hutang luar negeri yang terus meningkat serta susah-susah Sri Lanka untuk keluar dari keterpurukan hutang luar negeri tersebut. Pendekatan teori ketergantungan menekankan pada hubungan keuangan internasional di mana hutang luar negeri tidak bersifat netral bahkan lebih cenderung mendorong ketergantungan. Hutang luar negeri menciptakan situasi dominasi dari pihak asing.

Menghadapi kesulitan ekonomi dengan kenyataan bahwa pembangunan infrastruktur yang telah dibangun tidak memberikan hasil yang signifikan serta tidak adanya cadangan uang tunai untuk membayar pinjaman luar negeri, Sri Lanka segera membuat keputusan beserta kesepakatan bersama mitra. Sri Lanka tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut yang menyebabkan Sri Lanka menyetujui untuk memberi Tiongkok kepemilikan saham, pengendalian, pengoperasian, dan sewa selama 99 tahun ke depan. Tahap pertama pembangunan proyek pelabuhan Hambantota menelan biaya sebesar USD 307 Juta dengan bunga 6,4%. Bunga pinjaman hutang luar negeri dari berbagai aktor dapat dilihat pada tabel berikut:

Negara	Bunga Pinjaman Luar Negeri
Jepang	0,10%
Korea Selatan	0,15%
Malaysia	Pinjaman tanpa bunga
Austria	Pinjaman tanpa bunga
<i>KBC Bank of Belgium</i>	Pinjaman tanpa bunga
Tiongkok melalui Bank EXIM:	
<i>Government Concessional Loan</i>	2%
<i>Preferential Buyer's Credit</i>	2%
<i>Buyer's Credit</i>	2,4%
World Bank:	
<i>International Development Association (IDA)</i>	Pinjaman tanpa bunga

Tabel 2. Bunga Pinjaman Luar Negeri

Total bunga dari pinjaman luar negeri Tiongkok sebesar 6,4% sangatlah tinggi dibandingkan dengan *Multilateral Development Bank* yang biasanya menawarkan pinjaman dengan suku bunga mendekati 2-3% bahkan terkadang mendekati 0% (CSIS Brief, 2018). Salah satu Sri Lanka menerima tawaran pinjaman luar negeri dari Tiongkok adalah karena Sri Lanka tidak memiliki mitra alternatif lain yang lebih baik dan Tiongkok tidak begitu ketat dalam persyaratan mereka dalam hal perlindungan dan reformasi. Tidak adanya tawaran

bersaing untuk proyek pelabuhan Hambantota menandakan bahwa pemberi pinjaman potensial lainnya tidak melihat peluang dan imbalan yang sepadan dengan risiko pembangunan proyek (CSIS Brief, 2018). Meningkatnya pinjaman luar negeri terhadap Tiongkok menyebabkan tingginya pembayaran hutang luar negeri serta bunga hutang luar negeri.

Sesuai dengan isi dari *Hambantota Port Concession Agreement*, Sri Lanka secara resmi melepaskan saham pelabuhan Hambantota kepada Tiongkok sebagai bagian dari kesepakatan konsensi kedua negara yang ditandatangani pada bulan Juli 2017. *China Merchants Holdings (International) Company Ltd* mengambil alih 85% kepemilikan saham pelabuhan Hambantota dengan imbalan USD 1,1 Miliar hutang Sri Lanka ke Tiongkok. Perusahaan asal Tiongkok tersebut juga menjalankan *Colombo's South Container Terminal*. Bandara Internasional Mattala juga akan diambil alih oleh perusahaan Tiongkok karena permasalahan hutang. Tiongkok juga mendapatkan 11,5 Km² tanah akan dibuat sebagai zona industri termasuk pabrik dan kilang minyak senilai USD 3 Miliar. Melalui kesepakatan tersebut, Tiongkok memiliki hak untuk menggunakan semua aset termasuk tanggung jawab operasi serta sebagian besar pendapatan langsung dari konsumen akan dimiliki oleh Tiongkok selaku pemilik konsensi dan pemegang saham terbesar sesuai yang telah tercantum pada *Hambantota Port Concession Agreement* (Xiaopeng, 2017). Akibat dari kepemilikan pelabuhan Hambantota pada pihak Tiongkok, selain mengalami kerugian finansial Sri Lanka juga mengalami kerugian dalam hal lain. Di antaranya larangan Sri Lanka melakukan kerja sama dengan pihak ketiga manapun dalam radius 100 meter dari pelabuhan Hambantota sebagaimana yang telah tercantum pada perjanjian tersebut. Alih-alih mendapatkan hasil yang signifikan dari pembangunan infrastruktur, Sri Lanka justru harus merasakan beban yang begitu berat mulai dari mengeluarkan biaya lebih untuk biaya perawatan bangunan, untuk membayar hutang luar negeri dan bunga hutang bahkan pelabuhan Hambantota kini resmi berpindah tangan kepada Tiongkok sebagai pemilik saham terbesar.

Theotonio Dos Santos membedakan tiga jenis ketergantungan, yakni (a) ketergantungan kolonial; (b) ketergantungan finansial-industrial; dan (c) ketergantungan industri-teknologi (Dos Santos, 1970). Ketergantungan finansial-industrial menyebabkan ketidakberdayaan negara pinggiran karena sebagian besar pendapatan negara didapatkan melalui kegiatan perdagangan ekspor. Sedangkan pendapatan tersebut tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan reinvestasi dan pembayaran hutang luar negeri beserta bunganya karena pendapatan tersebut digunakan kembali oleh pemerintah untuk membeli input dari luar negeri sebagai akibat dari tingginya permintaan dalam negerinya. Pada kasus Sri Lanka, pada akhirnya Sri Lanka harus selalu impor produk dari Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Tiongkok berhasil menjadi negara dominan untuk kegiatan impor ke Sri Lanka dan menyebabkan terjadinya defisit perdagangan.

Para tokoh dari teori ketergantungan seperti Andre Gunder Frank dan Theotonio Dos Santos berpendapat bahwa keterbelakangan yang dialami oleh negara pinggiran merupakan konsekuensi dari adanya sistem dunia yang tidak seimbang. Yang mana terdapat sekelompok negara kuat mengeksploitasi negara yang lebih lemah (Sekhri, 2009). Sifat dasar eksploitatif menciptakan kondisi keterbelakangan di negara pinggiran sebagai hasil kontak dari negara pusat. Kontak tersebut yang kemudian melahirkan sebuah pola hubungan ketergantungan dua negara asimetris yang tidak sama kuat sehingga menimbulkan ketergantungan. Dalam kasus Sri Lanka, eksploitasi muncul dari kebijakan dan perjanjian yang dilakukan oleh Tiongkok dan Sri Lanka. Berdasarkan *Hambantota Port Concession Agreement*, perusahaan asal Tiongkok berhak memiliki sebesar 85% kepemilikan saham (Xiaopeng, 2017). Usaha eksploitasi lebih lanjut dilakukan oleh perusahaan asal Tiongkok, *China Merchants Holdings (International) Company Ltd* yang mendapatkan zona seluas 11,5 Km² di sekitar pelabuhan Hambantota yang akan digunakan untuk keperluan industri. Bahkan Sri Lanka tidak diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga pada area yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Eksplorasi lebih lanjut dari Tiongkok terhadap Sri Lanka adalah pada proyek pembangunan *Colombo Port City Project* di mana pemerintah mengumumkan area seluas 10 Km merupakan area *no-fishing zone*. Padahal area tersebut merupakan daerah penangkapan ikan dengan hasil tinggi. Tentu saja ini merugikan masyarakat Sri Lanka yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Sebab terdapat 30.000 nelayan dan 600.000 masyarakat yang menggantungkan hidupnya untuk berdagang ikan (PAN Asia Pasific, 2017). Ketergantungan dari bantuan luar negeri ditandai dengan adanya transfer bantuan dari negara pusat ke negara pinggiran (Kabonga, 2017). Tetapi pada faktanya, bantuan dari negara pusat berupa pinjaman luar negeri justru lebih menguntungkan negara-negara yang menawarkan bantuan daripada negara yang menerimanya. Dalam hal ini, pinjaman negara pusat telah digunakan sebagai instrumen yang kuat untuk memperkuat ketergantungan yang ada antara Sri Lanka dan Tiongkok.

KESIMPULAN

Pengaruh bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Sri Lanka menyebabkan adanya ketergantungan bantuan luar negeri. Sebab, ketergantungan bantuan luar negeri ditandai dengan adanya transfer bantuan dari negara pusat ke negara pinggiran. Namun faktanya, bantuan luar negeri menguntungkan negara pusat dan merugikan negara pinggiran. Pada akhirnya, bantuan luar negeri berupa pinjaman luar negeri digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat ketergantungan yang ada di Sri Lanka. Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan, Tiongkok berhasil memperluas pengaruh ekonominya di negara Sri Lanka dengan menjadi negara dominan untuk kegiatan impor ke Sri Lanka dan menyebabkan defisit perdagangan di antara kedua negara. Kondisi tersebut menyebabkan adanya ketergantungan perdagangan yang diakibatkan oleh tingginya permintaan domestik Sri Lanka terkait produk impor teknologi dari Tiongkok sedangkan Sri Lanka hanya mengeksport bahan mentah. Usaha eksploitasi ditunjukkan pada keberhasilan Tiongkok dalam mengakuisisi infrastruktur di Sri Lanka. Di mana Tiongkok menjadi pemegang saham terbesar sehingga memiliki hak untuk menggunakan semua aset termasuk tanggung jawab operasi serta sebagian pendapatan langsung dari konsumen akan dimiliki oleh Tiongkok selaku pemegang saham terbesar sesuai yang tercantum pada *Hambantota Port Concession Agreement* (Xiaopeng, 2017). Lebih lanjut, dalam proyek *Colombo Port City Project* pemerintah menerapkan kebijakan *no-fishing zone* seluas 10 Km yang merugikan masyarakat Sri Lanka di mana sebanyak 600.000 masyarakat Sri Lanka menggantungkan hidupnya untuk berjualan ikan. Secara jelas dapat dilihat bahwa Tiongkok berhasil memperluas pengaruh ekonominya di Sri Lanka dengan melakukan eksploitasi sedangkan Sri Lanka hanya bisa menerima dampak dan akibat dari pengaruh tersebut dengan melemahnya perekonomian negara sebagai konsekuensi dari adanya defisit perdagangan dan hutang luar negeri terhadap Tiongkok yang jumlahnya banyak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin memberikan apresiasi serta menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Dra. Reni Windiani, M.S. selaku Dosen Pembimbing I penulis dan Bapak Fendy Eko Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan masukan, arahan, tanggapan, dan kritikan kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Satwika Paramasatya, S.IP, M.A selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran untuk menyempurnakan isi penelitian sehingga jurnal ini dapat diterbitkan. Semoga Ibu Reni, Bapak Fendy, dan Bapak Satya selalu diberikan kesehatan.

REFERENSI

Andersson, M. (2009). *Motives behind the Allocation of Aid*.

- Bareksa. (2022). *Neraca Perdagangan*. Bareksa.
- CNN Indonesia. (2022). Pasar Monopoli. *CNN Indonesia*.
- CSIS Brief. (2018). *Game of Loans: How China Bought Hambantota*.
- Department of External Resources. (2022, April 14). *Loan and Grant*. Department of External Resources.
- dos Santos, T. (1970). *The Structure of Dependence*. 60(2), 231–236. <https://www.jstor.org/stable/1815811>
- Frank, A. G. (1996). *The Underdevelopment of Development*.
- Kabonga, I. (2017). Dependency Theory and Donor Aid: A Critical Analysis. *Africanus: Journal of Development Studies*, 46(2), 29–39. <https://doi.org/10.25159/0304-615x/1096>
- Kelegama, S. (2014). China-Sri Lanka Economic Relations: An overview. In *China Report* (Vol. 50, Issue 2). Sage Publications India Pvt. Ltd. <https://doi.org/10.1177/0009445514523646>
- Madanayaka, S. A. K. (2016). Opportunities for Sri Lanka through China-Sri Lanka Relations (2004-2015). *International Postgraduated Research Conference*, 190. <http://repository.kln.ac.lk/handle/123456789/16092>
- Marshall, L. (2009, November 13). Winners and Losers in Sri Lanka's Long War. *Inside Story*. <https://insidestory.org.au/winners-and-losers-in-sri-lankas-long-war/>
- PAN Asia Pasific. (2017, October 18). Debt and Destruction: China-Funded Projects in Sri Lanka Stir Controversy, Conflict. *PAN Asia Pasific*.
- Picard, A. L., Groelsema, R., & Buss, T. F. (2008). *Foreign Aid and Foreign Policy : Lessons for the Next Half-Century* (1st Editio). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315704289>
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional* (Y. S. Hayati, Ed.; Cetakan ke-1). PT. RajaGrafindo.
- Sekhri, S. (2009). Dependency Approach: Chances of Survival in the 21st Century. *Journal of Political Science and International Relations*, 3(5), 242–252. <http://www.academicjournals.org/AJPSIR>
- Wibisono, A. N. (2019). China's "Belt Road and Initiative" in Sri Lanka : Debt Diplomacy in Hambantota Port Investment. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2(2). <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JM/article/view/1482>
- Xiaopeng, L. (2017). *Potential Discloseable Transaction Concession Agreement in Relation to Hambantota Port, Sri Lanka*.